

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Asikin, Zainal. et.al., Dasar-dasar Perburuhan., PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2006.

Asyadie, Zaeni., Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja., PT Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2007.

Djumaidi., Perjanjian Kerja., PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2004.

Djumialdji, F.X., Perjanjian Kerja., Bumi Aksara., Jakarta, 1997.

_____., Perjanjian Kerja, Edisi Revisi., Sinar Grafika., Jakarta, 2008.

Husni, Lalu., Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia., PT Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2003.

Kartasapoetra, G. et.al., Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja., Amrico., Bandung, 1983.

_____., Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Cet II., Bina Aksara., Jakarta, 1988.

Kaisipo, Manuel., Mitos Kerja., Prisma., Jakarta, 1981.

Khakim, Abdul., Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia., PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Maimun., Hukum Ketenagakerjaan., PT Pradnya Paramitha., Jakarta, 2004.

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu., Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan., PT Remaja Rosdakarya., Bandung, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum., Kencana Prenada Media Group., Jakarta, 2005.

Prinst, Darwan., Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)., PT Citra Aditya Bakti., Bandung, 1994.

_____., Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet II., pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rusli, Hardijan., Hukum Ketenagakerjaan., Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

_____., Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Kedua., PT Ghalia Indonesia., Bogor, 2011.

Shamad, Yunus., Hubungan Industrial Di Indonesia., PT Bina Sumberdaya Manusia., Jakarta, 1995.

Soedarjadi., Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia., Pustaka Yustisia., Yogyakarta, 2008.

Soepomo, Imam., Pengantar Hukum Perburuhan., Djambatan., Jakarta, 2003.

Subekti, R., Aneka Perjanjian, Cet X., PT Citra Aditya Bakti., Bandung, 1995.

Syamsudin, Mohd syaufii., Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial., Sarana Bakti Persada., Jakarta, 2004.

Wijayanti, Asri., Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi., Sinar Grafika., Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Upah).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 (PERGUB Upah Jatim 2017).

C. Referensi dari Internet

Disnaker Belum Tahu Besaran Kenaikan UMK Surabaya, 2016, diakses dari <http://www.antarajatim.com> Pada tanggal 05 Desember 2016, pukul 20.09 WIB.

LAMPIRAN



GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 121 TAHUN 2016
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula Upah Minimum Kabupaten/ Kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2016, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2017.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya


pada tanggal 18 Nopember 2016


GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 18 Nopember 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum


Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO. SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 121, SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 121 TAHUN 2016

TANGGAL: 18 NOPEMBER 2016

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	UMK 2017
1	KOTA SURABAYA	Rp. 3.296.212,50
2	KAB. GRESIK	Rp. 3.293.506,25
3	KAB. SIDOARJO	Rp. 3.290.800,00
4	KAB. PASURUAN	Rp. 3.288.093,75
5	KAB. MOJOKERTO	Rp. 3.279.975,00
6	KAB. MALANG	Rp. 2.368.510,00
7	KOTA MALANG	Rp. 2.272.167,50
8	KAB. BATU	Rp. 2.193.145,00
9	KAB. JOMBANG	Rp. 2.083.730,00
10	KAB. TUBAN	Rp. 1.901.952,50
11	KOTA PASURUAN	Rp. 1.901.952,50
12	KAB. PROBOLINGGO	Rp. 1.879.220,00
13	KAB. JEMBER	Rp. 1.763.392,50
14	KOTA MOJOKERTO	Rp. 1.735.247,50
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 1.735.247,50
16	KAB. BANYUWANGI	Rp. 1.730.917,50
17	KAB. LAMONGAN	Rp. 1.702.772,50
18	KOTA KEDIRI	Rp. 1.617.255,00
19	KAB. BOJONEGORO	Rp. 1.582.615,00
20	KAB. KEDIRI	Rp. 1.576.120,00
21	KAB. LUMAJANG	Rp. 1.555.552,50
22	KAB. TULUNGANGGUNG	Rp. 1.537.150,00
23	KAB. BONDOWOSO	Rp. 1.533.902,50
24	KAB. BANGKALAN	Rp. 1.530.655,00
25	KAB. NGANJUK	Rp. 1.527.407,50
26	KAB. BLITAR	Rp. 1.520.912,50
27	KAB. SUMENEP	Rp. 1.513.335,00
28	KOTA MADIUN	Rp. 1.509.005,00
29	KOTA BLITAR	Rp. 1.509.005,00
30	KAB. SAMPANG	Rp. 1.501.427,50
31	KAB. SITUBONDO	Rp. 1.487.335,00
32	KAB. PAMEKASAN	Rp. 1.461.357,00
33	KAB. MADIUN	Rp. 1.450.550,00
34	KAB. NGAWI	Rp. 1.444.055,00

35	KAB. PONOROGO	Rp. 1.388.847,50
36	KAB. PACITAN	Rp. 1.388.847,50
37	KAB. TRENGGALEK	Rp. 1.388.847,50
38	KAB MAGETAN	Rp. 1.388.847,50


GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO